



**Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Perspektif
Total Institution: Studi di Satuan Pelayanan Sosial Griya
Bina Karya Cirebon**

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Meutia Hariyanti UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia hariyantimeutia543@gmail.com Musahwi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia musahwi@uinssc.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Hariyanti, M., & Musahwi. (2026). Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis Perspektif Total Institution: Studi di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2),1886-1896.

Abstrak

Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) masih menjadi masalah sosial di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Cirebon, yang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya keterampilan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon serta menganalisisnya menggunakan perspektif teori *Total Institution*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari petugas lembaga dan warga binaan sosial yang terlibat dalam program rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dilakukan melalui pembinaan mental, disiplin, keagamaan, dan pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan dengan sistem yang jelas serta jadwal yang teratur. Seluruh aktivitas warga binaan berada dalam pengawasan lembaga sehingga mencerminkan konsep *Total Institution*. Proses ini memberikan dampak positif berupa perubahan perilaku, peningkatan kedisiplinan, kemampuan sosial, serta kesiapan untuk hidup mandiri, meskipun masih terdapat hambatan seperti kejenuhan dan tekanan psikologis selama proses pembinaan.

Kata Kunci: Gelandangan Dan Pengemis, Rehabilitasi Sosial, *Total Institution*, Pembinaan Sosial

Abstract

The phenomenon of vagrancy and begging remains a social problem in various regions, including Cirebon Regency, influenced by factors such as poverty, low levels of education, and limited job skills. This study aims to examine the social rehabilitation process for vagrants and beggars at the Griya Bina Karya Social Service Unit in Cirebon and to analyze it using the Total Institution theory perspective. The method used is qualitative with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation. Research informants consist of agency staff and social service recipients involved in the rehabilitation program. The results of the study indicate that social rehabilitation is carried out through mental, disciplinary, and religious guidance, as well as vocational skills training, implemented through a clear system and a regular schedule. All activities of the residents are under the institution's supervision, reflecting the concept of the Total Institution. This process yields positive outcomes, including behavioral changes, improved discipline, enhanced social skills, and readiness for independent living, although challenges such as boredom and psychological stress persist during the rehabilitation process.

Key Words: Homeless People And Beggars, Social Rehabilitation, Total Institution, Social Rehabilitation

A. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan sosial yang rumit di Indonesia karena tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga memengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sehingga memunculkan berbagai bentuk masalah sosial, salah satunya fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2025), jumlah penduduk miskin di Indonesia masih berada pada angka yang cukup tinggi, termasuk di Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tingginya mobilitas sosial dan urbanisasi di wilayah perkotaan Jawa Barat turut memengaruhi munculnya kelompok masyarakat rentan yang tidak memiliki akses ekonomi dan sosial secara memadai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berlangsung belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Fenomena gelandangan dan pengemis menjadi salah satu bentuk nyata dari ketimpangan sosial yang masih terjadi di berbagai daerah perkotaan. Keberadaan mereka di jalan raya, pasar, terminal, tempat ibadah, dan pusat keramaian menunjukkan adanya kelompok yang terpinggirkan secara sosial akibat keterbatasan ekonomi dan rendahnya akses terhadap pekerjaan yang layak. Menurut Maryatun et al. (2022) gelandangan dan pengemis merupakan kelompok rentan yang muncul akibat kombinasi faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, dan lemahnya akses pelayanan sosial. Selain faktor ekonomi dan kondisi lingkungan, rendahnya keterampilan kerja dan terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan formal juga menyebabkan sebagian individu memilih aktivitas mengemis sebagai strategi bertahan hidup. Dalam beberapa kasus, aktivitas tersebut berkembang menjadi kebiasaan sosial yang dilakukan secara berulang karena dianggap lebih mudah dibandingkan bekerja di sektor formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan lemahnya keterlibatan kelompok yang terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat.

Kabupaten Cirebon sebagai salah satu wilayah dengan perkembangan ekonomi dan mobilitas sosial yang cukup tinggi juga menghadapi persoalan gelandangan dan pengemis. Berdasarkan kondisi yang terlihat di lapangan, gelandangan dan pengemis masih ditemukan di sejumlah titik strategis seperti kawasan perdagangan, terminal, lampu merah, dan pusat keramaian lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain menimbulkan persoalan kesejahteraan sosial, keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) juga sering dikaitkan dengan terganggunya ketertiban umum dan munculnya pandangan negatif dari masyarakat. Menurut Idza (2023) menjelaskan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis selama ini masih lebih banyak dilakukan melalui pendekatan penertiban dan pengawasan sosial, sementara akar permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan keterbatasan akses ekonomi belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, penanganan

gelandangan dan pengemis (gepeng) memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui rehabilitasi sosial yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial individu secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk penanganan terhadap permasalahan tersebut, pemerintah melalui dinas sosial menyelenggarakan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis. Rehabilitasi sosial merupakan proses pelayanan yang bertujuan memulihkan kemampuan individu agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di dalam masyarakat. Program rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga meliputi pembinaan mental, sosial, spiritual, dan pelatihan keterampilan kerja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah et al. (2024) menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti pendekatan awal, penilaian kondisi, pembinaan sosial, pelatihan keterampilan, hingga pengembalian ke lingkungan masyarakat. Melalui proses tersebut, warga binaan diharapkan mampu hidup mandiri dan tidak kembali menjalani aktivitas menggelandang maupun mengemis setelah menyelesaikan program rehabilitasi. Namun demikian, pelaksanaan rehabilitasi sosial masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pendampingan lanjutan, dan rendahnya kesiapan ekonomi warga binaan setelah keluar dari lembaga rehabilitasi.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis umumnya dilakukan melalui lembaga atau panti sosial yang dikelola pemerintah. Salah satu lembaga yang memiliki fungsi tersebut adalah Satuan Pelayanan Sosial (SatPelSos) Griya Bina Karya Cirebon. Lembaga ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara khusus menangani rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selain itu, Griya Bina Karya Cirebon menerapkan sistem pembinaan yang terstruktur melalui pengaturan aktivitas harian, pembinaan kedisiplinan, pelatihan keterampilan, dan pengawasan sosial yang dilakukan secara terus-menerus oleh petugas. Seluruh warga binaan menjalani kehidupan secara bersama-sama dengan jadwal dan aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Kondisi tersebut menciptakan kehidupan sosial yang cukup tertutup dan berbeda dari kehidupan masyarakat pada umumnya karena seluruh aktivitas individu berada dalam pengawasan lembaga.

Kehidupan yang berlangsung secara terstruktur dan terkontrol di dalam panti sosial dapat dipahami melalui konsep *Total Institution* yang dikemukakan oleh Erving Goffman (1961) dalam *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. Goffman menjelaskan bahwa *Total Institution* merupakan sistem sosial tertutup yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan individu di dalamnya, mulai dari aktivitas sehari-hari, pola interaksi sosial, hingga pembentukan perilaku dan identitas sosial. Individu yang berada di dalam institusi tersebut menjalani kehidupan secara kolektif di bawah aturan dan pengawasan yang ketat. Penelitian Sofyan et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pembatasan aktivitas dalam lembaga rehabilitasi dapat memengaruhi perubahan perilaku individu. Akan tetapi, pola pembinaan yang terlalu bergantung pada aturan lembaga juga berpotensi menimbulkan ketergantungan sosial sehingga warga binaan mengalami kesulitan ketika harus kembali beradaptasi dengan kehidupan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis, tetapi sebagian besar masih berfokus pada efektivitas program, hambatan pelaksanaan, dan keberhasilan pembinaan secara kelembagaan. Penelitian Sumantri et al. (2018) menemukan bahwa rehabilitasi sosial mampu mengubah perilaku dasar warga binaan, tetapi belum sepenuhnya menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Sementara penelitian Widiana et al. (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pendampingan pascarehabilitasi menjadi hambatan dalam keberhasilan program rehabilitasi sosial. Namun demikian, penelitian sebelumnya masih lebih banyak menyoroti aspek teknis pelaksanaan program dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana pengawasan sosial, serta bentuk pengendalian dalam lembaga rehabilitasi membentuk perilaku dan identitas sosial warga binaan. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait penerapan konsep *Total Institution* dalam proses rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis, khususnya pada konteks lembaga rehabilitasi sosial pemerintah di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana proses rehabilitasi sosial dilaksanakan di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon dan bagaimana penerapan *Total Institution* diterapkan dalam pembinaan gelandangan dan pengemis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembinaan sosial membentuk perilaku dan identitas sosial warga binaan melalui perspektif *Total Institution*. Dengan menggunakan perspektif sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian mengenai rehabilitasi sosial dan *Total*

Institution, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan program pelayanan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses rehabilitasi sosial serta penerapan konsep *Total Institution* dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena sosial berdasarkan pengalaman nyata, interaksi, serta pola kehidupan warga binaan dalam lingkungan lembaga yang memiliki sistem pengaturan ketat. Penelitian kualitatif dipandang relevan untuk menggali realitas sosial secara utuh melalui observasi kondisi alamiah tanpa adanya manipulasi terhadap situasi yang diteliti, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika kehidupan sosial di dalam panti rehabilitasi (Fadli, 2021). Dalam konteks ini, fokus penelitian tidak hanya pada aspek pengelolaan program, tetapi juga pada bagaimana kehidupan sehari-hari warga binaan dibentuk melalui sistem pembinaan, pengawasan, dan kedisiplinan yang terstruktur.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai proses rehabilitasi sosial, aktivitas harian warga binaan, serta pola interaksi antara pembina dan warga binaan. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena sosial berdasarkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan, khususnya terkait pelaksanaan aturan, pembinaan keterampilan, dan pengawasan dalam lembaga rehabilitasi. Lokasi penelitian berada di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon, yang secara khusus menangani rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis melalui program pembinaan mental, sosial, spiritual, serta pelatihan keterampilan kerja yang terstruktur. Subjek penelitian terdiri dari pimpinan lembaga, pekerja sosial atau pendamping klien, warga binaan sosial, serta alumni rehabilitasi yang telah kembali ke masyarakat. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses rehabilitasi sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas warga binaan seperti kegiatan keterampilan, pembinaan mental, serta penerapan jadwal harian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman subjek dalam mengikuti proses rehabilitasi sosial. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pola rehabilitasi sosial dan penerapan *Total Institution* di dalam lembaga (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lembaga

Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon merupakan lembaga rehabilitasi sosial yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan berfokus pada penanganan gelandangan dan pengemis melalui pendekatan pembinaan terpadu. Lembaga ini didirikan sebagai respons terhadap meningkatnya masalah sosial di perkotaan yang berkaitan dengan kemiskinan, keterlantaran, dan terbatasnya akses pekerjaan. Dalam perspektif *total institution*, lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian perilaku penghuni melalui aturan yang tersusun dengan jelas serta kegiatan yang telah dijadwalkan. Seluruh aktivitas warga binaan dilakukan di dalam lingkungan lembaga sehingga proses rehabilitasi dapat berlangsung secara intensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengaturan kehidupan sehari-hari yang bertujuan membentuk kembali pola perilaku individu agar mampu menyesuaikan diri dengan norma sosial di masyarakat. Menurut Goffman (1961), institusi total memiliki karakter berupa pemisahan individu dari kehidupan sosial sebelumnya dan penataan aktivitas secara berkelompok dalam satu sistem yang tersusun dengan baik. Pendekatan ini terlihat pada pola pembinaan di SatPelSos Griya Bina Karya Cirebon yang menekankan disiplin, keteraturan, dan perubahan perilaku sosial warga binaan.

Struktur organisasi lembaga terdiri atas kepala satuan pelayanan sosial, bagian administrasi, pekerja sosial, instruktur keterampilan, pembina mental, pembina polisi, pembina

keagamaan, serta petugas keamanan dan kesehatan. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya sistem pengelolaan kerja yang mendukung keberlangsungan rehabilitasi sosial secara menyeluruh. Pekerja sosial memiliki peran utama dalam melakukan asesmen, pendampingan, serta evaluasi perkembangan warga binaan selama mengikuti program rehabilitasi. Selain itu, instruktur keterampilan bertanggung jawab memberikan pelatihan kerja yang sesuai dengan minat yang dipilih oleh warga binaan. Sistem kerja yang tersusun dengan baik ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada upaya membentuk kembali fungsi sosial individu. Penelitian Putra et al. (2021) menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis dilakukan melalui pembinaan secara berkelanjutan agar mereka dapat kembali menjalankan peran sosial secara mandiri di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan struktur organisasi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial di lembaga tersebut.

Program rehabilitasi sosial di SatPelSos Griya Bina Karya Cirebon dilakukan melalui beberapa bentuk pembinaan, salah satunya adalah pembinaan mental. Pembinaan mental bertujuan meningkatkan kesadaran diri, motivasi hidup, dan rasa percaya diri warga binaan agar mampu berhenti dari kebiasaan menggelandang maupun mengemis. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui bimbingan individu, bimbingan kelompok, pemberian motivasi oleh pekerja sosial dan pembina mental. Proses pembinaan mental memiliki peran penting karena sebagian besar warga binaan mengalami tekanan psikologis, kurang percaya diri, dan sudah terbiasa dengan kehidupan di jalanan. Dalam perspektif institusi total, pembinaan mental digunakan sebagai upaya membentuk identitas baru yang lebih sesuai dengan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga binaan mulai mengalami perubahan perilaku, seperti lebih disiplin, mampu berinteraksi dengan baik, dan memiliki keinginan untuk bekerja secara layak. Menurut Wahyuni et al. (2022), rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan fungsi sosial individu agar mampu menjalankan perannya secara normal di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan mental menjadi salah satu bagian penting dalam proses rehabilitasi sosial di lembaga ini.

Selain pembinaan mental, lembaga juga menerapkan pembinaan disiplin melalui aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga binaan. Pembinaan disiplin dilakukan dengan menerapkan jadwal kegiatan harian, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, apel pagi, serta pengawasan terhadap perilaku warga binaan selama berada di dalam lembaga. Sistem disiplin ini bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pola hidup yang teratur agar warga binaan mampu menyesuaikan diri ketika kembali ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya, beberapa warga binaan pada awalnya mengalami kesulitan dalam mengikuti aturan yang cukup ketat karena sebelumnya terbiasa hidup bebas di jalanan. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian besar mulai memahami pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Selain itu, pembinaan keterampilan juga diberikan melalui pelatihan barista, barbershop, dan otomotif. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan warga binaan dalam mencari penghasilan, sehingga mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Pendekatan ini sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial yang menekankan pemberdayaan individu melalui peningkatan kemampuan diri dan keterampilan hidup.

Pembinaan keagamaan menjadi bagian penting dalam rehabilitasi sosial di SatPelSos Griya Bina Karya Cirebon karena bertujuan memperkuat nilai moral dan spiritual warga binaan. Kegiatan keagamaan dilakukan melalui mengaji, salat berjamaah, serta pembelajaran etika dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan ini bertujuan menanamkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sosial dan moral terhadap dirinya maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pembinaan keagamaan memberikan pengaruh positif terhadap perubahan perilaku warga binaan, terutama dalam pengendalian emosi, kesadaran diri, dan motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam perspektif *total institution*, kegiatan keagamaan juga menjadi media kontrol sosial yang membantu lembaga membentuk pola perilaku yang sesuai dengan tujuan rehabilitasi. Secara keseluruhan, program rehabilitasi sosial di Griya Bina Karya Cirebon menunjukkan bahwa pendekatan menyeluruh melalui pembinaan mental, disiplin, keterampilan, dan keagamaan mampu membantu proses pemulihan kembali ke masyarakat bagi gelandangan dan pengemis. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu warga binaan sosial (WBS 3) yang menyampaikan bahwa, "Selama mengikuti rehabilitasi sosial, saya merasa lebih diperhatikan dan diarahkan untuk menjalani hidup yang lebih baik". Meskipun dalam pelaksanaan program masih ditemukan beberapa hambatan, lembaga ini tetap memiliki peran penting dalam mengurangi permasalahan sosial serta meningkatkan keberfungsian sosial warga binaan.

Proses Pembinaan Sosial Warga Binaan

Proses pembinaan sosial di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon diawali dengan tahap penerimaan dan adaptasi bagi setiap warga binaan yang masuk ke dalam lembaga. Pada tahap ini, petugas melakukan pendataan identitas, latar belakang sosial, kondisi ekonomi, serta riwayat kehidupan warga binaan sebelum mengikuti rehabilitasi sosial. Setelah proses administrasi selesai, warga binaan diperkenalkan dengan lingkungan lembaga beserta aturan yang harus dipatuhi selama menjalani masa rehabilitasi. Tahap adaptasi menjadi bagian penting karena sebagian besar warga binaan sebelumnya terbiasa hidup bebas di jalanan sehingga mengalami kesulitan mengikuti sistem kehidupan yang lebih teratur di dalam lembaga. Hal tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan pekerja sosial 1 yang menyampaikan bahwa, “Pada awal masuk, banyak warga binaan sulit menyesuaikan diri karena sebelumnya terbiasa hidup bebas di jalanan, sehingga kami melakukan pendekatan secara bertahap”. Dalam perspektif *total institution*, proses adaptasi dilakukan untuk membentuk pola perilaku baru yang sesuai dengan norma sosial di dalam lembaga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ainunnisa (2026) menjelaskan bahwa pembinaan sosial terhadap kelompok terpinggirkan memerlukan tahapan awal berupa penyesuaian agar individu mampu menerima aturan dan menjalani rehabilitasi secara bertahap. Oleh sebab itu, tahap penerimaan dan adaptasi menjadi dasar penting dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial di lembaga tersebut.

Pada tahap adaptasi, warga binaan juga diarahkan untuk memahami tata tertib dan jadwal kegiatan yang berlaku di lingkungan SatPelSos Griya Bina Karya Cirebon. Aturan tersebut meliputi waktu bangun pagi, kegiatan kebersihan, pembinaan sosial, hingga waktu istirahat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga binaan. Sistem ini bertujuan membentuk pola hidup yang lebih teratur dan mengurangi kebiasaan hidup bebas yang sebelumnya dilakukan di jalanan. Pada awalnya, beberapa warga binaan menunjukkan penolakan terhadap aturan lembaga karena merasa kehilangan kebebasan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun, melalui pendekatan secara baik dan bertahap yang dilakukan oleh pekerja sosial, warga binaan mulai memahami bahwa aturan tersebut merupakan bagian penting dari proses rehabilitasi sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prima (2026) menjelaskan bahwa proses pembinaan sosial membutuhkan pendekatan yang dilakukan secara bertahap agar individu mampu menerima perubahan perilaku dan disiplin sosial dengan lebih efektif. Dengan demikian, penyesuaian terhadap aturan lembaga menjadi bagian penting dalam membentuk sikap disiplin warga binaan selama menjalani rehabilitasi sosial.

Pembentukan disiplin sosial di SatPelSos Griya Bina Karya Cirebon dilakukan melalui penerapan jadwal kegiatan harian yang tersusun dengan baik dan dilaksanakan secara rutin. Setiap warga binaan diharuskan mengikuti seluruh kegiatan mulai dari apel pagi, kerja bakti, pembinaan mental, pembinaan disiplin pelatihan keterampilan, hingga kegiatan keagamaan. Jadwal yang teratur tersebut bertujuan membiasakan warga binaan hidup disiplin dan bertanggung jawab terhadap kewajiban yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu pegawai sosial (PS 2) menyampaikan bahwa, “Kegiatan harian dibuat teratur supaya warga binaan terbiasa disiplin dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri”. Selain itu, penerapan jadwal harian juga menjadi sarana kontrol sosial bagi lembaga dalam mengawasi perkembangan perilaku warga binaan. Dalam perspektif institusi total, pengaturan waktu dan aktivitas dilakukan untuk membentuk pola kehidupan yang lebih tertib dan produktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian warga binaan mengalami perubahan perilaku setelah mengikuti rutinitas harian secara konsisten, seperti lebih tepat waktu, menjaga kebersihan, dan mematuhi aturan lembaga. Penelitian oleh Kustianingsih (2023) menyatakan bahwa disiplin sosial dalam lembaga pembinaan dapat meningkatkan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih teratur. Oleh sebab itu, jadwal kegiatan harian menjadi alat penting dalam proses rehabilitasi sosial warga binaan.

Selain melalui jadwal kegiatan, pembentukan disiplin sosial juga dilakukan melalui penerapan aturan perilaku yang diawasi langsung oleh petugas lembaga. Aturan tersebut meliputi larangan bertindak kasar, kewajiban menjaga ketertiban, serta pembatasan perilaku yang dapat mengganggu proses rehabilitasi sosial. Petugas memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan memberikan arahan apabila terdapat warga binaan yang melanggar aturan. Pengawasan dilakukan secara terus-menerus agar warga binaan terbiasa menjalankan kehidupan yang sesuai dengan norma sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengawasan tidak hanya dilakukan dengan tindakan tegas, tetapi juga melalui pendekatan secara baik dan bertahap serta memberikan pemahaman agar warga binaan dapat memahami tujuan dari aturan yang diterapkan. Penelitian Nisrina (2024) menjelaskan bahwa pengawasan

dan pembentukan disiplin sosial merupakan bagian dari upaya pemerintah dan lembaga sosial dalam membangun keteraturan serta tanggung jawab sosial individu. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara konsisten, warga binaan secara perlahan mampu mengendalikan perilaku dan meningkatkan kesadaran sosial selama menjalani rehabilitasi.

Pembinaan mental dan keagamaan menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi sosial di SatPelSos Griya Bina Karya Cirebon. Pembinaan mental dilakukan melalui pendampingan individu maupun kelompok yang bertujuan membantu warga binaan memahami permasalahan hidup yang mereka alami. Dalam kegiatan pendampingan tersebut, pekerja sosial memberikan motivasi agar warga binaan memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan dan tidak kembali menjadi gelandangan maupun pengemis setelah keluar dari lembaga. Berdasarkan hasil wawancara, pegawai sosial (PS 3) menyampaikan bahwa, "Kami memberikan motivasi dan pendampingan supaya mereka memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupannya". Selain pendampingan individu, lembaga juga mengadakan penyampaian motivasi yang menghadirkan pembina sosial maupun tokoh agama. Kegiatan tersebut berisi nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, serta pentingnya hidup mandiri di tengah masyarakat. Menurut Aulia (2026), pendekatan psikososial dan motivasi dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri serta memperbaiki kondisi emosional individu yang mengalami keterlantaran sosial. Oleh sebab itu, pembinaan mental menjadi salah satu upaya penting dalam membentuk perubahan perilaku warga binaan secara berkelanjutan.



Gambar 1. Kegiatan pemberian motivasi kepada warga binaan sosial

Kegiatan keagamaan juga dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk pembinaan spiritual bagi warga binaan selama menjalani rehabilitasi sosial. Kegiatan tersebut meliputi salat berjamaah, mengaji, serta pembelajaran akhlak dan etika sosial. Pembinaan keagamaan bertujuan meningkatkan kesadaran moral dan spiritual agar warga binaan memiliki pedoman hidup yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Dalam perspektif *total institution*, kegiatan keagamaan juga berfungsi sebagai media pembentukan dalam kemampuan mengendalikan diri dan penanaman nilai-nilai sosial yang sesuai dengan norma masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ibadah mampu memberikan ketenangan psikologis dan membantu warga binaan mengurangi perilaku menyimpang yang sebelumnya dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2025) menyebutkan bahwa pembinaan keagamaan dalam rehabilitasi sosial berperan penting dalam meningkatkan kesadaran diri serta membentuk perilaku yang lebih positif dan produktif. Dengan demikian, pembinaan spiritual menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan rehabilitasi sosial di SatPelSos Griya Bina Karya Cirebon.

Selain pembinaan mental dan keagamaan, lembaga juga memberikan pembinaan keterampilan sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi warga binaan. Pelatihan keterampilan dilakukan melalui kegiatan barista, barbershop, dan otomotif sesuai dengan minat warga binaan. Program ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kerja agar mereka dapat memperoleh pekerjaan atau membuka usaha setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial. Salah satu pegawai sosial (PS 1) menyampaikan bahwa, "Pelatihan keterampilan diberikan agar warga binaan memiliki kemampuan kerja setelah keluar dari lembaga ini". Selain itu, warga binaan juga dibiasakan melakukan aktivitas secara mandiri, seperti membersihkan lingkungan, mengatur kebutuhan pribadi, dan bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Pembiasaan hidup mandiri dilakukan supaya mereka tidak lagi bergantung pada aktivitas mengemis maupun hidup di jalanan. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan salah satu warga binaan (WBS 2) yang menyampaikan bahwa, "Saya jadi memiliki keterampilan baru dan ingin bekerja setelah keluar dari sini". Pembinaan keterampilan dalam rehabilitasi sosial dapat meningkatkan keberfungsian sosial serta kesiapan individu untuk kembali hidup secara mandiri di masyarakat

(Putra et al., 2021). Dengan adanya pelatihan kerja dan pembiasaan hidup mandiri, proses rehabilitasi sosial di SatPelSos Griya Bina Karya Cirebon diharapkan mampu menciptakan perubahan sosial yang lebih berkelanjutan bagi warga binaan.



Gambar 2. Pelatihan barista bagi warga binaan sosial

Pembentukan Perilaku dan Identitas Sosial Perspektif *Total Institution*

Dalam perspektif *total institution*, kehidupan warga binaan di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon diatur melalui sistem pengawasan sosial yang ketat dan tersusun dengan jelas. Seluruh aktivitas sehari-hari warga binaan telah dijadwalkan oleh lembaga mulai dari bangun pagi, kegiatan kebersihan, pembinaan sosial, pembinaan disiplin, pelatihan keterampilan, hingga waktu istirahat. Pengaturan aktivitas tersebut bertujuan menciptakan keteraturan hidup serta membentuk pola perilaku baru yang lebih disiplin dan produktif. Sistem ini menunjukkan bahwa lembaga memiliki wewenang penuh terhadap aktivitas warga binaan selama menjalani rehabilitasi sosial. Menurut Goffman (1961), institusi total merupakan tempat yang mengatur seluruh aspek kehidupan individu secara bersama-sama di bawah satu sistem kewenangan yang sama. Konsep tersebut terlihat dalam pola rehabilitasi di SatPelSos Griya Bina Karya Cirebon yang menempatkan warga binaan dalam lingkungan yang diawasi secara penuh untuk membentuk kembali perilaku sosial mereka. Dengan adanya pengaturan aktivitas yang tersusun dengan baik, warga binaan secara perlahan mulai terbiasa menjalani kehidupan yang lebih tertib dan terarah dibandingkan kehidupan sebelumnya di jalanan.

Selain pengaturan aktivitas sehari-hari, pengawasan sosial juga tampak terlihat melalui pembatasan kebebasan individu selama warga binaan berada di dalam lembaga rehabilitasi sosial. Warga binaan tidak dapat keluar masuk lembaga secara bebas dan harus mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh petugas. Pembatasan tersebut bertujuan mengurangi kemungkinan warga binaan kembali pada pola hidup lama, seperti mengemis atau hidup berpindah-pindah di jalanan. Dalam pelaksanaannya, beberapa warga binaan pada awalnya merasa kehilangan kebebasan karena terbiasa hidup tanpa aturan sebelum masuk ke lembaga rehabilitasi. Namun, melalui proses adaptasi dan pendampingan sosial, mereka mulai memahami bahwa pembatasan tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanny Purnamasari, S.Sos. & Munawan (2017) menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan terarah agar individu mampu menyesuaikan diri dengan norma sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pembatasan kebebasan dalam institusi rehabilitasi dipandang sebagai strategi resosialisasi untuk membentuk perilaku sosial yang lebih baik.

Kepatuhan terhadap aturan lembaga menjadi salah satu tanda penting dalam keberhasilan rehabilitasi sosial warga binaan. Aturan yang diterapkan meliputi kedisiplinan waktu, tata tertib perilaku, kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan, serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Petugas lembaga melakukan pengawasan secara langsung untuk memastikan seluruh warga binaan mematuhi aturan yang berlaku. Dalam perspektif institusi total, kepatuhan terhadap aturan merupakan bentuk pemahaman dan penerapan nilai sosial yang dilakukan melalui kontrol sosial dan pembiasaan perilaku sehari-hari. Temuan penelitian menunjukkan bahwa warga binaan yang sebelumnya sulit diatur mulai menunjukkan perubahan sikap seperti lebih tertib, sopan, dan bertanggung jawab setelah mengikuti pembinaan sosial secara rutin. Penelitian oleh Ikhsan et al. (2020) menyatakan bahwa rehabilitasi sosial yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu membentuk keteraturan perilaku dan meningkatkan kemampuan individu dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan lembaga menjadi bagian dari proses pembentukan identitas sosial baru bagi warga binaan.

Perubahan perilaku warga binaan terlihat dari perubahan pola hidup yang sebelumnya cenderung bebas dan tidak teratur menjadi lebih disiplin dan terarah. Sebelum mengikuti

rehabilitasi sosial, sebagian besar warga binaan menjalani kehidupan di jalanan dengan pola aktivitas yang tidak menentu serta bergantung pada belas kasihan masyarakat. Setelah berada di dalam lembaga, mereka mulai terbiasa menjalani kegiatan yang sudah dijadwalkan dan memiliki tanggung jawab terhadap aktivitas sehari-hari. Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan salah satu warga binaan (WBS 1) yang menyampaikan bahwa, "Sekarang saya sudah terbiasa bangun pagi, mengikuti kegiatan, dan lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri". Perubahan tersebut tidak terjadi secara cepat, melainkan melalui proses pembinaan sosial yang dilakukan secara bertahap dan konsisten. Dalam analisis Berger & Luckmann (1966), realitas sosial terbentuk melalui proses sosialisasi dan pemahaman terhadap nilai sosial yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pola hidup warga binaan dipengaruhi oleh lingkungan sosial baru yang dibentuk oleh lembaga rehabilitasi. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan secara rutin dan mendalam, warga binaan mulai memahami pentingnya keteraturan hidup dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Peningkatan kedisiplinan juga menjadi salah satu bentuk perubahan perilaku yang terlihat selama proses rehabilitasi sosial berlangsung. Warga binaan mulai mampu mengikuti jadwal kegiatan dengan tertib, menaati aturan lembaga, serta menjalankan tugas yang diberikan oleh petugas pendamping. Sikap disiplin tersebut dibentuk melalui pembiasaan aktivitas harian yang dilakukan secara berulang dan diawasi secara langsung oleh lembaga. Dalam perspektif *total institution*, disiplin menjadi sarana pengawasan sosial untuk membentuk individu agar mampu menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian oleh Pranoto (2024) menjelaskan bahwa program rehabilitasi sosial memiliki fungsi penting dalam membentuk perilaku disiplin dan meningkatkan keberfungsian sosial kelompok terpinggirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kedisiplinan warga binaan juga berdampak pada meningkatnya rasa tanggung jawab dan kemampuan mereka dalam bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, pembentukan disiplin menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi sosial di SatPelSos Griya Bina Karya Cirebon.

Selain kedisiplinan, perubahan perilaku warga binaan terlihat pada cara mereka berinteraksi sosial dengan sesama warga binaan maupun petugas lembaga. Sebagian warga binaan yang sebelumnya memiliki sikap tertutup, mudah marah, atau kurang percaya diri mulai menunjukkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan lebih baik. Perubahan ini dipengaruhi oleh kegiatan pembinaan kelompok, pendampingan sosial, serta aktivitas bersama yang dilakukan selama proses rehabilitasi berlangsung. Lingkungan lembaga secara tidak langsung membentuk pola hubungan sosial baru yang lebih teratur dan mampu bekerja sama. Dalam pandangan Durkheim (1984), solidaritas sosial dapat terbentuk melalui kebiasaan hidup bersama dan adanya aturan bersama yang dipatuhi oleh anggota kelompok. Konsep tersebut terlihat dalam kehidupan warga binaan yang mulai membangun hubungan sosial berdasarkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, rehabilitasi sosial tidak hanya mengubah perilaku individu, tetapi juga membentuk pola interaksi sosial yang lebih positif di lingkungan lembaga.

Proses rehabilitasi sosial di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon juga berperan dalam membentuk identitas sosial baru bagi warga binaan. Sebelum masuk ke lembaga, mereka sering kali mendapat pandangan negatif sebagai pengemis, gelandangan, atau kelompok terpinggirkan yang dianggap tidak produktif oleh masyarakat. Melalui pembinaan sosial, mental, keterampilan, dan keagamaan, warga binaan diarahkan untuk membangun citra diri yang lebih positif dan mandiri. Pemahaman terhadap nilai sosial baru dilakukan melalui pembiasaan hidup disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan pelatihan keterampilan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian warga binaan mulai memiliki harapan untuk bekerja secara layak dan diterima kembali oleh masyarakat setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial. Penelitian Putra et al. (2021) menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial bertujuan mengembalikan keberfungsian sosial individu agar mampu menjalankan peran sosial secara mandiri di masyarakat. Oleh sebab itu, pembentukan identitas sosial baru menjadi tanda penting dalam keberhasilan proses resosialisasi warga binaan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan rehabilitasi sosial di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon memiliki kesesuaian dengan konsep *total institution* karena lembaga menjalankan fungsi kontrol sosial, pembinaan perilaku, dan proses penyesuaian kembali ke masyarakat terhadap warga binaan secara menyeluruh. Sistem pengawasan yang ketat, pengaturan aktivitas harian, serta pembatasan kebebasan individu menunjukkan adanya karakter institusi total sebagaimana dijelaskan oleh Goffman. Di sisi lain, pendekatan tersebut juga memberikan dampak positif berupa perubahan perilaku, peningkatan kedisiplinan, dan

terbentuknya identitas sosial baru yang lebih produktif. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, seperti adanya rasa jenuh, tekanan psikologis, dan kesulitan adaptasi yang dialami sebagian warga binaan selama berada di dalam lembaga. Oleh sebab itu, lembaga perlu menyeimbangkan antara kontrol sosial dan pendekatan yang lebih peduli terhadap kondisi warga binaan agar proses rehabilitasi tidak hanya menghasilkan kepatuhan sementara, tetapi juga kesadaran sosial yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, rehabilitasi sosial dapat menjadi sarana efektif dalam membantu gelandangan dan pengemis kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial di Satuan Pelayanan Sosial Griya Bina Karya Cirebon dilakukan melalui pembinaan yang tersusun dengan jelas, meliputi pembinaan mental, disiplin, keagamaan, dan pelatihan keterampilan kerja. Seluruh aktivitas warga binaan diatur melalui jadwal dan aturan lembaga sehingga proses rehabilitasi berlangsung dalam pengawasan yang terarah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penerapan konsep *Total Institution* karena lembaga mengatur hampir seluruh aspek kehidupan warga binaan, mulai dari aktivitas sehari-hari, pola interaksi sosial, hingga pembentukan perilaku dan identitas sosial baru. Melalui proses pembinaan tersebut, warga binaan mulai mengalami perubahan perilaku seperti lebih disiplin, menjaga kebersihan, menghargai aturan, dan mampu berinteraksi sosial dengan lebih baik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan seperti barista, barbershop, dan otomotif membantu meningkatkan rasa percaya diri serta kesiapan warga binaan untuk hidup lebih mandiri setelah keluar dari lembaga. Selain itu, pembinaan mental dan keagamaan memberikan pengaruh terhadap perubahan sikap dan cara pandang warga binaan terhadap kehidupan sosial. Namun, pelaksanaan rehabilitasi sosial masih menghadapi hambatan seperti rasa jenuh, tekanan psikologis, dan kesulitan sebagian warga binaan dalam menyesuaikan diri dengan aturan lembaga.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, lembaga diharapkan dapat meningkatkan pendampingan psikososial dan memperkuat program pascarehabilitasi agar warga binaan lebih siap kembali ke masyarakat. Pemerintah juga diharapkan dapat memperluas program pemberdayaan sosial dan kesempatan kerja bagi kelompok rentan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji keberlanjutan kehidupan warga binaan setelah menyelesaikan rehabilitasi sosial.

E. Referensi

- Ainunnisa, F. (2026). *Implementasi Pasal 8 dan 9 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan Perspektif Siyash Tanfidziyah*.
- Aulia, A. S. (2026). *Terapi Psikososial sebagai Media Motivasi Pemulihan pada Korban Penyalahgunaan NAPZA di Sentra "Satria" Baturaden*.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge*.
- Durkheim, E. (1984). *The division of labor in society*.
- Fadhilah, A., Ramdani, R., & Rizki, M. F. (2024). Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya. *Communnity Development Journal*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i3.29204>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Jurnal Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/https://orcid.org/0000-0003-1370-2653>
- Goffman, E. (1961). *Asylums : essays on the social situation of mental patients and other inmates*.
- Hanny Purnamasari, S.Sos., M. A. ., & Munawan, R. (2017). Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana dalam Menanggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Khusus Anak Jalanan di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 134–146.
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan dan Pengemis dalam Konteks Ketenteraman dan Ketertiban Umum: Analisis Dampak dan Solusi. *Jurnal Tatapamong*, 5(2), 145–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>
- Ikhsan, N., Nur, S. A., & A'yun, L. Q. (2020). Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Lembaga

- Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat DI Kota Makassar. *PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL*, 954–977.
- Kustianingsih, R. (2023). *Peran Dinas Sosial terhadap Penyandang Disabilitas pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu*.
- Maryatun, Raharjo, S. T., & Taftazani, B. M. (2022). Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis. *Sosio Informa*, 8(1), 47–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2977>
- Nisrina, A. (2024). *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pengemis dan Pengamen di Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Siyâsah Dusturiyâh*.
- Pranoto, B. I. (2024). *Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2021–2022*.
- Prima, S. M. (2026). *Peran dinas sosial dalam penanganan kasus eksploitasi anak di kota palopo*.
- Putra, A. R., Suhendar, & Rustanto, B. (2021). Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya Kecamatan Cisarua - Bandung Barat. *Jurnal Prosiding Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung*, 409–418.
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Saputra, R. (2025). *Analisis Siyâsah Tanfiziyyah terhadap Implementasi Pasal 17 Poin C Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan*.
- Sofyan, O., Adam, S., & Patty, J. M. (2024). Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 4(2), 95–105. <https://doi.org/10.47268/sanisa.v4i2.3020>
- Statistik, B. P. (2025). *Tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2025 sebesar 10,23 persen*. Cirebonkab.Bps.Go.Id. <https://cirebonkab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/10/01/1631/tingkat-kemiskinan-di-kabupaten-cirebon-tahun-2025-sebesar-10-23-persen.html>
- Sumantri, I., Pikri, F., & Lubis, M. A. (2018). Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.15575/jpan.v10i1.7622>
- Wahyuni, A., Hartanto, R. V. P., & Nuryadi, M. H. (2022). Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta. *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 336–349. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2525>
- Widiana, T. R., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2023). Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(4), 147–165.